

Menerka Kebijakan Kapolri



Edi Setiadi

Guru Besar Hukum Universitas Islam Bandung

PENUNJUKAN Tito Karnavian sebagai kapolri menarik untuk diantisipasi, terutama ke arah mana kebijakan akan mengarahkan tugas dan fungsinya. Apabila sesuai dengan alur pengalaman yang dimiliki Tito, fungsi rekrut dan pemberantasan terorisme akan menjadi fokus utama program kerja kapolri walaupun tetap tidak menghilangkan fungsi pembinaan masyarakat oleh kepolisian.

Penguatan fungsi rekrut sebenarnya tidak ada salabnya juga, mengingat tren kejahatan semakin meningkat. Fungsi rekrut ini apabila dijalankan dengan baik, rasa nyaman dan aman masyarakat akan terpromosi. Fungsi kepolisian sebagai penjaga keamanan masyarakat akan terwujud dan stabilitas akan terjaga. Sebagai bayang-bayang negara, polisi harus semakin mengokohkan diri sebagai penyambung dan pelindung masyarakat dari kejahatan-kajahatan yang berasal dari masyarakat itu sendiri maupun tindakan-tindakan semena-mena negara terhadap masyarakat.

Walaupun karier Tito Karnavian ini memang sudah sebelumnya masyarakat memperhatikan, memantau, dan mengawasi polisi bahkan memberi kritik sehingga tugas-tugas polisi bisa bermanfaat bagi masyarakat yang dilindunginya. Menciptakan polisi yang baik bukan melulu tugas negara, tetapi masyarakat di sekelilingnya berpengaruh kepada perilaku polisi. Keberhasilan penegakan hukum yang dilakukan polisi bergantung kepada peran serta masyarakat.

Kesan polisi dalam menjalankan tugasnya tajam apabila menghadapi kasus-kasus yang melibatkan masyarakat kebanyakan. Akan tetapi, akan tumpul dan meredup apabila kasus tersebut melibatkan pegawai negara harus bisa dihapuskan oleh kapolri baru nanti.

Tantangan

Tantangan polisi di masa depan bukanlah semakin ringan karena seiring dengan kemajuan zaman dan tingginya permintaan masyarakat akan memikul beban kasus berupa muncunya tren kejahatan baru. Oleh karena itu, antipansi dan peningkatan kemampuan personal rekrut harus mendapat perhatian, pemahaman terhadap undang-undang harus semakin diarahkan apalagi menggunakan pasal-pasal KUHP yang nyata-nyata buatan kolonial, tentu saja tidak akan lagi up to date apabila diterapkan dalam suasana zaman sekarang.

Ada hal yang menarik apabila melihat perkembangan usulan BNPT dalam menyikapi revisi undang-undang terorisme. BNPT mengusulkan bahwa opsi deradikalisasi harus mendapat prioritas dalam revisi Undang-Undang Terorisme. Dengan demikian, entah ketubuhan atau tidak, usulan ini apabila disetujui DPR, akan dijalankan oleh kapolri yang sebelumnya menjabat kepala BNPT. Usulan ini mengundangi arah bahwa kepolisian ke depan dalam memberantas terorisme akan lebih mementingkan program deradikalisasi daripada opsi penegakan hukum yang tegas (peradilan atau tembak di tempat). Barangkali kasus

Siyono menjadi pelajaran penting bagi jajaran kepolisian sehingga mengubah strategi pemberantasan terorisme dari yang tegas ke arah yang lebih manusiawi

Pekerjaan kapolri baru nanti di samping tugas pokok tadi adalah mengubah persepsi masyarakat yang selama ini menganggap kepolisian sebagai lembaga yang tidak independen, walaupun dapat dikatakan sangat sulit polisi menjaga independensinya. Masalah diperbantakan kepada persoalan diperbantakan antara negara dan masyarakat.

Apabila ingin dikatakan sebagai lembaga independen, sikap-sikap mengulur perkara atau mengalihkan isu kasus yang melibatkan pegawai harus segera dilemahkan dan diakhiri.

Sejak adanya Densus 88, kinerja polisi bukan tidak mendapat apresiasi dari masyarakat dalam hal penanggulangan terorisme polisi sudah dianggap berhasil walaupun setelah penangkapan dan penindakan tugas tersebut, pelaku-pelaku terorisme baru bermunculan karena akar persoalan terjadinya terorisme belum diantisipasi dan ditangani dengan baik oleh kepolisian.

Diyakini dengan diangkatnya Tito Karnavian sebagai kapolri, arah penegakan hukum terhadap kasus terorisme akan mengalami perubahan signifikan. Kepolisian akan mengadopsi gaya penindakan yang tegas ke arah penindakan yang soft. Polisi yang berjaya militer harus dengan cepat berubah menjadi polisi sipil yang lebih menekankan sikap-sikap menghormati hukum dan keadilan daripada menekankan aspek-aspek kekerasan serta pelaksanaan tugas yang lebih humanis. Sosok polisi harus berubah dari sosok yang sangar ke arah sosok yang friendly, tetapi tegas terhadap kejahatan.

Konsep deradikalisasi yang dicanangkan akan dilaksa-

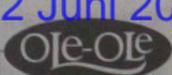
nakan harus mencari akat utama dari timbulnya terorisme. Secara kasat mata, sebenarnya akar permasalahan terorisme berasal dari ketidakadilan, kemiskinan, dan keterbelakangan pendidikan dari pelaku.

Di tengah rasa frustrasi masyarakat terhadap kondisi perekonomian, peluang atau iming-iming dari pihak lain bisa menjadi pemacu timbulnya aksi terorisme walaupun dibuntut dengan isi agama tertentu. Menekad akan memperhatikan faktor-faktor kondusif yang menimbulkan kejahatan terorisme harus mendapat perhatian utama dari kapolri sehingga nantinya konsep deradikalisasi akan berjalan sukses.

Transnasional

Mengingat tarakan presiden kepada kapolri baru adalah pemberantasan kejahatan yang bersifat transnasional, usaha yang dapat dilakukan adalah memperkenalkan kepada polisi-polisi kita ke berbagai instrumen internasional yang sudah disepakati yang mengatur prinsip dasar dan kode etik aparat penegak hukum, walaupun instrumen nasional belum mengaturnya. Polisi harus dapat berpikir dan melihat ke depan serta cepat terhadap lingkungan internasional sehingga perilaku polisi dapat sejajar atau sesuai dengan kaidah-kaidah yang mengatur kepolisian baik secara nasional maupun internasional.

Dalam sisi tanya jawab dengan wartawan, presiden menegaskan bahwa tugas kapolri juga adalah memberantas korupsi. Polisi kerap dianggap keodoran dalam menangani kasus korupsi di samping lembaga penegak hukum yang lain seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terlepas dari lambannya kepolisian menanggulangi kasus korupsi, kita maklum bahwa tugas kepolisian lebih banyak



sampah

RAMADAN sampah bertambah.

- Tak bisa puasa rutin.

tpg

TPG non-PNS cair bulan ini.

- Asik.

damri

WARGA apresiasi layanan DAMRI.

- Supir ketar ketir.

Si Habajan

ragamnya misalnya karena itu juga menjaga keamanan masyarakat dari kejahatan, paslah tren dan modus kejahatan berkembang pesat. Tugas seperti ini tidak dimiliki lembaga penegakan hukum lainnya. Selain itu, penanganan kasus korupsi baru diberikan kepada polisi sehingga polisi harus mempersiapkan sumber daya manusia untuk mengemban tugas ini.

Harapan-harapan baru inilah yang menjadi tugas utama kapolri dan Tito Karnavian adalah seorang perwira tinggi yang masih muda dan telah menjadi the rising star baru di tubuh kepolisian. Mudah-mudahan harapan dan kritik masyarakat kepada kepolisian bisa terus diperbaiki dengan menganggap bahwa semua wujud itu adalah sebagai kritik perhatian masyarakat kepada kepolisian yang lebih baik lagi. Polisi harus bersikap profesional dengan berkata dan bertindak yang ajeg sesuai dengan hukum dan etika. Polisi jangan bersikap seperti polisi yang demi kepentingan sendiri dan partainya mengorbankan akal sehat dan kepatutan yang ada dalam masyarakat. Selamat bekerja komandan. ***